

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ribuan tahun, etnis Tionghoa sudah mengenal Nusantara. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh (Tarihoran, 2016) bahwa sejak kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah menjalin hubungan yang erat dengan dinasti-dinasti yang ada dataran Tionghoa, baik dalam bidang perdagangan maupun bidang diplomatik. Etnis Tionghoa yang bermukim di Indonesia mayoritas berasal dari suku Hokkien, Tiochiu, dan Hakka, sehingga etnis Tionghoa juga bisa disebut etnis Tinglang karena berasal dari suku Hokkien, etnis Tenggong karena berasal dari suku Tiochiu, dan etnis Thongyin karena berasal dari suku Hakka.

Menurut Christian (2017), mayoritas etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia berasal dari daerah Guangdong, Hokkian, dan Hainan. Sejarah kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia diawali dengan pola perdagangan. Dalam perkembangannya, tidak hanya pola perdagangan yang dimainkan etnis Tionghoa di Indonesia, mereka juga berperan sebagai buruh ketika Indonesia dikuasai oleh VOC. Selanjutnya, mereka memerankan beragam profesi dalam perjalanan sejarahnya di Indonesia.

Di Indonesia, etnis Tionghoa ada yang tinggal di wilayah perkotaan dan ada pula yang tinggal di wilayah pedesaan. Mereka yang tinggal di perkotaan mayoritas berprofesi sebagai pengusaha, dokter, dan pemilik klinik. Sementara

etnis Tionghoa yang tinggal di pedesaan mayoritas berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan perkebunan.

Tujuan utama etnis Tionghoa tinggal di perkotaan menurut Karmela & Pamungkas (2017), karena di kota merupakan tempat yang strategis untuk melakukan pengembangan ekonomi. Sehingga bisa dipastikan bahwa di mana ada tempat yang ramai, di situ ada etnis Tionghoa yang berdagang. Selain itu, kota juga menjadi simbol heterogenitas etnis. Kota merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya beragam etnis, baik yang datang dari luar daerah maupun dari luar negeri.

Menurut Prihartanti, Taufik, & Thoyibi, (2009), masyarakat di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi adalah penduduk asli yang diakui sebagai suku bangsa yang bukan pendatang dari negeri lainnya, seperti: suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Batak, dan suku-suku lainnya. Sedangkan masyarakat pendatang adalah masyarakat selain penduduk asli atau pribumi, seperti etnis Tionghoa.

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berada di ujung pulau Madura. Secara sosiologis, Kabupaten Sumenep memiliki beragam etnis yang hidup berdampingan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Setidaknya ada beberapa etnis yang ada di Sumenep, yaitu, etnis Madura, Jawa, Arab dan Tionghoa.

Etnis Jawa hampir menyebar di semua kecamatan di Sumenep. Mereka umumnya berprofesi sebagai guru (ASN) dan pedagang. Berbeda dengan etnis Arab yang hanya bermukim di daerah perkotaan, khususnya di kelurahan Pengarangan dan Kapanjin. Wilayah tersebut dikenal dengan *Kampong Arab* (perkampungan orang Arab) yang mayoritas dari mereka berprofesi sebagai pedagang dan juru dakwah.

Sementara etnis Tionghoa di Sumenep sebagian besar bermukim di wilayah kota Sumenep dan beberapa kecamatan, seperti Pasongsongan, Dungkek, Batang-Batang, Lenteng, dan Kalianget. Khusus di wilayah kecamatan Batang-Batang terdapat kampung yang disebut *paccenan* atau *pecinan*. *Peccenan* ini merupakan sebuah perkampungan etnis Tionghoa. Dalam sejarahnya, mereka masuk ke Sumenep melalui pelabuhan Dungkek yang kemudian banyak bermukim di wilayah *peccenan* hingga sekarang. Keturunan Tionghoa di Dungkek semua beragama Islam dan pemukiman mereka rata-rata berarsitektur Tionghoa.

Aktivitas sehari-hari etnis Tionghoa di Sumenep berkisar pada dua sektor usaha, yaitu perdagangan dan kesehatan. Bidang usaha perdagangan tersebar di berbagai kecamatan dan kota Sumenep. Mayoritas mereka mempunyai usaha ekonomi berupa toko yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari toko kelontong, toko kue, hingga toko elektronik.

Sektor strategis lainnya yang menjadi usaha golongan etnis Tionghoa adalah sektor kesehatan yaitu dokter spesialis dan pemilik apotek. Di Sumenep, dokter spesialis sebagian besar digeluti oleh etnis Tionghoa, seperti: dr. Widodo Oetomo (dokter senior), dr. Dian Marcia, Sp.A, dr. Dominicus Husada, Sp.A (spesialis anak), dr. Wongso Suhendro, Sp.OG (spesialis kandungan), dr. Susianto (penyakit dalam), dan dr. Shinta W. Oetomo. Bahkan, dr. Shinta W. Oetomo ini pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep pada tahun 2007. Salah satu apotek terbesar di Sumenep adalah Apotek Kimia Farma, milik dr. Widodo Oetomo.

Selain penguasaan ekonomi, kehadiran etnis Tionghoa di Sumenep menjadi pembeda dalam keyakinan beragama. Kebanyakan dari mereka menganut agama Konghucu, Budha, Katolik, dan Kristen. Bagi mereka yang beragama Konghucu dan Budha, mereka melaksanakan ritual sembahyang di Klenteng desa Pabian Kota Sumenep. Sementara mereka yang beragama Katolik melaksanakan ritual agamanya di Gereja desa Pabian Kota Sumenep, dan mereka yang beragama Kristen Protestan melaksanakan ritual keagamanya di Gereja desa Kolor Kota Sumenep. Sedangkan etnis Tionghoa yang beragama Islam melaksanakan ibadah di masjid terdekat dari komunitasnya.

Dalam hal praktik keagamaan, etnis Tionghoa yang beragama muslim, seperti yang tinggal di daerah Pasongsongan, cenderung mengikuti tradisi Muhammadiyah ketimbang Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan mereka yang

tinggal di Pasongsongan, etnis Tionghoa Muslim yang tinggal di daerah Dungkek cenderung mengikuti tradisi Nahdlatul Ulama. Ini artinya, dalam praktik keagamaan, etnis Tionghoa yang beragama Islam tidak memiliki tradisi beragama yang homogen, melainkan heterogen.

Heterogenitas beragama dan etnisitas dalam pandangan Patta (2014), di satu sisi menjadi kekayaan khazanah tradisi yang tidak ternilai harganya. Kekayaan khazanah tradisi ini tidak dimiliki oleh negara lain yang memiliki etnisitas dan tradisi beragama yang homogen. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi salah satu faktor munculnya konflik sosial. Ini misalnya konflik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1995, konflik di Situbondo pada tahun 1996, dan konflik di Cikampek pada tahun 1996, konflik di Tasikmalaya pada tahun 1996, kerusuhan di Pontianak pada tahun 1997, kerusuhan di Rengasdengklok pada tahun 1997, kerusuhan di Ambon pada tahun 1999, dan selanjutnya kerusuhan yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001.

Munculnya beragam konflik tersebut di atas salah satu faktornya adalah interaksi sosial yang kurang baik antar etnis dan suku sehingga menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial satu dengan lainnya. Oleh karena itu, interaksi sosial (komunikasi timbal balik) menjadi prasyarat utama dalam membangun harmonisasi antar kelompok maupun individu.

Di Indonesia, puncak gerakan anti Tionghoa muncul pada peristiwa yang terjadi tanggal 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Peristiwa tersebut mempertontonkan sebuah aksi kekerasan terhadap etnis Tionghoa, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia kategori berat. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang terjadi itu merupakan salah satu bentuk manifestasi dari sikap anti Tionghoa tersebut (Pardede, 2002).

Bahkan meledaknya kerusuhan rasial massif pada 13-15 Mei 1998 dengan sasaran warga Tionghoa di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya merupakan puncak dari gunung es kecemburuan, kedengkian dan mungkin kebencian sebagian masyarakat yang selama ini ditimbun kebijakan politik Orde Baru. Tentu saja, kerusuhan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek materi semata, bahkan lebih jauh lagi adalah dampak psikologis hubungan interaksi sosial antar etnis.

Konflik etnis di atas tidak berdampak pada runtuhnya hubungan sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Madura. Sebagaimana penuturan subjek_1, salah seorang sesepuh Tionghoa di kecamatan Lenteng Sumenep, sejak kakek buyutnya tinggal di Sumenep tidak pernah terjadi konflik antara etnis Tionghoa dan etnis Madura. (Wawancara, di Sumenep 20 April 2019).

Kesaksian di atas diamini oleh subjek_2, keturunan etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang dan beragama Islam, bahwa sejak menginjakkan kakinya di Sumenep dapat dikatakan tidak pernah terjadi konflik dengan etnis

Madura walaupun mayoritas etnis Tionghoa berprofesi sebagai pedagang yang selalu bergesekan dengan pedagang etnis Madura (Wawancara, di Sumenep 20 April 2019).

Kesaksian kedua subjek tersebut, peneliti memahami bahwa di Sumenep tidak pernah ada konflik antara etnis Tionghoa dan etnis Madura sejak etnis Tionghoa datang ke Sumenep tahun 1270 M. Namun hanya ada pergesekan perdagangan seperti yang terjadi di Prenduan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Huub de Jonge, (1989) bahwa pernah terjadi gesekan konflik pada era 1930-an yaitu meletusnya kerusuhan anti Tionghoa di Prenduan setelah berdirinya Sarekat Islam. Memang, pada era itu banyak meletus kerusuhan anti Tionghoa bukan hanya di Madura, tetapi juga di kota-kota di Jawa, dari Bangil hingga Kudus.

Namun secara umum, menurut Kuntowijoyo (1989), komunitas Tionghoa di Madura aman-aman saja, tidak terjadi kerusuhan rasialisme secara massif dan berskala besar. Kerusuhan anti Tionghoa itu hanya terjadi di Prenduan Sumenep dan bukan di seluruh Madura.

Harmonisasi interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal Sumenep juga terlihat dari bentuk arsitektur Masjid Agung Sumenep merupakan pengejawantahan dari perpaduan etnis (Tionghoa), sebagai salah satu simbol penghargaan nilai-nilai agama terhadap keragaman umat manusia dengan aneka latar kebudayaan yang berbeda. Sebagaimana dalam buku Sejarah

Sumenep (2003), realitas ini menunjukkan peninggalan budaya Islam yang amat menghargai keragaman budaya etnis Tionghoa.

Kajian ini menarik karena etnis Madura sejak lama digambarkan secara negatif sebagai komunitas yang berkarakter egois, pemarah, dan tidak mau kalah. Dengan demikian, dengan karakter tersebut di atas, seolah etnis Madura memiliki kecenderungan terlibat konflik dengan etnis lain yang berdampingan hidup di suatu tempat.

Munculnya perbedaan-perbedaan etnis, agama, dan ideologi bila tidak dikelola dengan baik, cenderung menimbulkan konflik antar pemeluk agama. Sebagaimana disampaikan oleh Purna bahwa konflik antar pemeluk agama dan etnis di Indonesia dikarenakan kecenderungan yang berlebihan terhadap kelompoknya masing-masing sehingga berusaha memusnahkan kelompok lainnya. Dalam hal keagamaan, antar pemeluk agama sama-sama merasa paling benar dan penganut agama lain pasti salah dan harus dimusnahkan. Padahal setiap agama tidak mengajarkan kekerasan, tetapi sama-sama mengajarkan kebaikan, baik dalam satu penganut ajaran agama, maupun terhadap penganut ajaran agama lainnya (Purna, 2016).

Munculnya konflik di masyarakat dalam pandangan Ali Humaidy tidak semata karena faktor ras atau etnis, namun juga munculnya konflik etnis biasanya juga karena adanya konflik budaya akibat kesenjangan budaya antara masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Humaidy menambahkan bahwa

adanya perbedaan dalam budaya semakin memicu adanya potensi konflik antar etnis. Selain faktor perbedaan budaya, kesenjangan ekonomi juga menjadi pemicu lainnya dari konflik. Apabila ada kesenjangan ekonomi antar etnis dalam satu kelompok masyarakat, maka ini menjadi pemicu terjadinya konflik antar etnis (Al Humaidy, 2012).

Beragamnya etnis dan suku yang hidup di Indonesia menjadi salah satu dampak dari kemajemukan sosial sehingga dapat juga disebut disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial adalah suatu proses dalam interaksi sosial dalam sesuatu masyarakat yang majemuk, di mana satu kelompok atau beberapa kelompok berusaha mengunggulkan identitasnya sendiri dan melakukan diskriminasi identitas lain karena pihak lain dianggap tidak mengamalkan ajaran atau nilai-nilai yang mereka anggap benar. Oknum kelompok tersebut berusaha agar kelompok lain menerapkan nilai-nilai yang menurut mereka paling benar. Sikap seperti ini yang menjadi salah satu faktor munculnya konflik antar etnis, agama, dan suku di Indonesia.

Keberadaan disintegrasi dalam interaksi sosial di masyarakat yang memiliki latar belakang perbedaan etnis, agama, dan suku ada yang dapat diselesaikan, namun juga ada yang tidak dapat diselesaikan. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia karena disintegrasi sosial tidak dapat diredam dalam interaksi sosial pada masyarakat majemuk sehingga terjadi konflik baik dalam skala kecil maupun skala besar.

Munculnya disintegrasi ini menurut para sosiolog disebabkan tidak harmonisnya dalam hubungan sosial, perebutan dan konflik politik, perebutan lahan dan aset dalam bidang ekonomi. Beberapa faktor tersebut yang menurut Wirawan, (2016) menjadi sumber keberadaan disintegrasi dalam interaksi sosial dalam masyarakat majemuk.

Dalam konteks etnis Tionghoa di Indonesia, keberadaan disintegrasi etnis Tionghoa dengan etnis pribumi dalam interaksi sosial muncul karena adanya sentimen yang berlebihan karena perbedaan dalam bidang perekonomian. Dalam hal perekonomian etnis Tionghoa yang ada di Indonesia mayoritas lebih baik daripada etnis pribumi sehingga menimbulkan kecemburuan yang akhirnya berakibat pada konflik antar etnis.

Pandangan terhadap etnis Tionghoa dalam konstelasi politik nasional maupun regional akan muncul pandangan sentimen etnisitas yang disebabkan perbedaan ras, agama, ekonomi dan perbedaan sikap politik. Munculnya perbedaan pandangan terhadap etnis Tionghoa berdampak pada renggangnya hubungan interaksi sosial (disharmoni) dalam lingkungan masyarakat, retaknya hubungan sosial dan munculnya benih konflik vertikal maupun horizontal.

Adanya disintegrasi etnis Tionghoa dan pribumi yang disebabkan faktor politik dan ekonomi sehingga pada tahun 1967 pemerintah menerbitkan beberapa aturan yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Aturan-aturan pemerintah berupa larangan mengekspos, memanfaatkan, dan menyiarkan

segala macam berita yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Pada era Orde Baru, Soeharto cenderung memusnahkan budaya etnis Tionghoa dalam interaksi sosial sehari-hari. Namun, dengan seiring dengan perkembangan zaman, disintegrasi antar etnis Tionghoa dengan pribumi mulai memudar seiring dengan pendewasaan yang ditampakkan oleh generasi muda yang dipengaruhi peran globalisme sehingga keberadaan sekat-sekat antar etnis di Indonesia lebih mudah diselesaikan (Mastuti, 2008).

Bila perbedaan-perbedaan di atas tidak dicarikan jalan keluar secara objektif dan proporsional, maka sebagaimana pendapat Wirawan, dikhawatirkan benih-benih disintegrasi sosial akan meningkat, terutama disintegrasi sosial yang bersifat horizontal, disintegrasi yang berkembang di antara anggota masyarakat.

Menurut Wirawan, disintegrasi merupakan suatu kondisi yang terjadi di masyarakat yang cenderung mengarah pada sebuah pertikaian, konflik, pertentangan, dan persaingan dengan tujuan satu pihak dengan lainnya saling menginginkan kejatuhan, kekalahan, ketersingkirkan bahkan memusnahkan, baik melalui konflik skala kecil maupun skala besar. Dalam hal ini, menurut Wirawan, interaksi sosial pada masyarakat majemuk pasti memunculkan disintegrasi, karena disintegrasi merupakan proses dalam interaksi sosial antar etnis, agama, dan suku (Wirawan, 2016).

Keharmonisan antar etnis Tionghoa dan etnis Madura di Sumenep dapat dijadikan miniatur harmonisasi perbedaan etnis dan agama. Oleh karena itu,

penelitian ini penting dikaji lebih dalam sehingga dapat memunculkan bentuk dan pola interaksi sosial dan modal sosial yang dimiliki etnis Tionghoa sehingga mereka dapat melakukan harmonisasi dengan etnis setempat khususnya etnis Madura.

Keharmonisan antar etnis Tionghoa dan etnis Madura dalam konteks pluralisme juga menjadi suatu kebanggaan dalam bingkai kebhinnekaan yang perlu dilestarikan. Namun, di sisi lain, keragaman suku, etnis dan agama jika tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan kerawanan konflik sosial. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menggali model dan bentuk bangunan interaksi sosial sebagai kekuatan modal sosial dalam membentuk masyarakat yang harmonis.

Dalam ilmu sosial, tujuan dari interaksi sosial pada dasarnya adalah terciptanya komunikasi yang baik, baik antar sesama etnis maupun dengan etnis lainnya. Dalam konteks interaksi sosial antar etnis, keberadaan komunikasi merupakan poin penting dalam membenturkan perbedaan tujuan dan nilai-nilai budaya setiap etnis sehingga terjadi harmonisasi dalam interaksi sosial antar etnis. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari terkadang terdapat beberapa faktor penghambat harmonisasi antar etnis seperti adanya sikap eksklusif dari etnis tertentu atau sentimen yang berlebihan dari etnis tertentu, namun semua itu dapat diselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik antar etnis (Darwis, 2013).

Penelitian ini menarik karena hendak mengkaji interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Madura, terutama yang berada di Sumenep. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Sumenep lantaran mayoritas dari mereka beragama Islam. Tantangan ini harus dijawab bagaimana mereka membangun pola interaksi sosial dalam pengamalan nilai-nilai kegamaan yang mengajarkan kesalehan sosial, tidak diskriminatif, dan tidak anarkis meskipun berhadapan dengan kelompok minoritas, baik dari segi pilihan politik, suku atau etnis, dan agama.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dirumuskan dua persoalan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Madura di Sumenep Madura?
2. Apa modal sosial yang dimiliki dalam membangun interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Madura di Sumenep Madura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Madura di Sumenep.

2. Untuk memahami modal sosial dalam membangun interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Madura di Sumenep Madura

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoretis.

Hasil penelitian hendak menemukan model dan pola interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Madura di Sumenep Madura.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi etnis Tionghoa dan etnis Madura, penelitian ini dapat dijadikan ‘pedoman’ dalam membangun interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terbangun peradaban sosial yang harmoni.

- b. Bagi keturunan etnis Tionghoa dan etnis Madura, penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam menanamkan nilai-nilai pluralisme, sehingga ke depan keturunan kedua etnis ini mampu meminimalisir konflik sosial.

- c. Bagi institusi formal (pemerintah) maupun informal (lembaga swadaya masyarakat), penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran dan pembumian nilai-nilai pluralisme.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya:

- a. Temuan tentang interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Madura di Sumenep dapat dijadikan objek kajian yang lebih mendalam, khususnya berhubungan dengan aspek sejarah masuknya etnis Tionghoa ke Madura, tidak terkecuali Kabupaten Sumenep.
- b. Secara konseptual, *social capital* etnis Tionghoa dan etnis Madura di Sumenep yang muncul dalam bentuk interaksi sosial senantiasa memerlukan pengkajian dan penelitian sebagai salah satu alternatif upaya untuk menemukan teori-teori *social capital* khususnya yang berhubungan dengan relasi antar etnis.

